

Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 (Audited)

Jalan Medan Merdeka Timur No.5 Lantai 3
Jakarta 10110

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi adalah salah satu entitas akuntansi dari Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 (Audited) Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kemementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 12 April 2018
Kepala Sekretariat

Drs. Bambang Sudaryono
NIP. 19600701 198803 1 012

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya	47
VI. Lampiran dan Daftar	47



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Lantai 3
Jl. Medan Merdeka Timur
No. 5 Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
e-mail : knkt@dephub.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun 2017 (Audited) Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2017 (Audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 13 April 2018
Kepala Sekretariat



Drs. Bambang Sudaryono
NIP. 196007011988031012

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tahun 2017 (Audited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.1.500.000,-. atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 0,-.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember TA 2017 adalah sebesar Rp.30.086.615.979,-. atau mencapai 90,29% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 33.321.670.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2017. Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 20.248.051.018.- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 41.258.700,- ; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 8.970.994,713,- ; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 11.271.797.605,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing - masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 20.284.051.018,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit pos luar biasa, dan surplus/defisit LO. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 0,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.33.589.741.583,-. sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.33.589.741.583,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Depisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.1.880.969,-. dan sebesar Rp.0,- , sehingga entitas mengalami Defisit LO sebesar Rp. 33.587.860.614,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 23.786.795.653,- ditambah Defisit-LO sebesar Rp.33.587.860.614,- ditambah koreksi nilai aset non revaluasi sebesar minus Rp.0,- ditambah koreksi lain-lain sebesar Rp.0,-, kemudian ditambah transaksi antar entitas sebesar Rp. 30.085.115.979,-, serta ditambah/dikurangi dengan kenaikan/penurunan Ekuitas senilai Rp.3.502.744.635,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp. 20.284.051.018,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode 31 Desember 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2017		% thd Angg	TA 2016
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1.	-	-	0.00	-
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	-	1,500,000	0.00	41,000,000
Jum Pendpt Negara & Hibah			1,500,000	0.00	41,000,000
B. Belanja Negara	B.2.				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	-	-	0.00	-
2. Belanja Barang	B.2.2.	32,794,749,000	29,562,689,979	0.90	24,713,568,922
3. Belanja Modal	B.2.3.	526,921,000	523,926,000	99.43	2,722,704,100
Jumlah Belanja Negara		33,321,670,000	30,086,615,979	90.29	27,436,273,022

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

II. NERACA

KANTOR KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.4	0	0
Persediaan	C.5	41.258.700	99,248,100
Jumlah Aset Lancar		41.258.700	99.248.100
ASET TETAP			
Tanah	C.6	0	0
Peralatan dan Mesin	C.7	38.392.219.904	38.383.844.004
Gedung dan Bangunan	C.8	0	0
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.9	75,515,000	75,515,000
Aset Tetap Lainnya	C.10	848.397.000	848.397.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.11	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.12	(30.345.137.191)	(27.979.769.256)
Jumlah Aset Tetap		8.970.994.713	11.327.986.748
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.13	19,058,945,480	19,058,945,480
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.14	0	0
Aset Lain-lain	C.15	0	127,000,000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.16	(7.787.147.875)	(6,826,384,675)
Jumlah Aset Lainnya		11.271.797.605	12,359,560,805
JUMLAH ASET		20.284.051.018	23,786,795,653
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.17	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.18	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	C.19	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.20	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.21	20.284.051.018	23,786,795,653
Jumlah Ekuitas		20.284.051.018	23,786,795,653
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		20.284.051.018	23,786,795,653

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016 (Audited)
EKUITAS AWAL	E.1	23,786,795,653	31,677,968,494
SURPLUS/DEFISIT – LO	E.2	(33,587,860,614)	(30,710,144,748)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	(4,576,301,115)
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1		
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.4		(4,576,301,115)
Koreksi Lain-lain	E.3.5		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	30,085,115,979	27,395,273,022
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS		(3,502,744,635)	(7,891,172,841)
EKUITAS AKHIR	E.5	20,284,051,018	23,786,795,653

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 42/PB/ 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Lantai 3 Jakarta, Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi. Melalui peran Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan

akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi berkomitmen dengan visi *“Terwujudnya keselamatan transportasi melalui pelaksanaan investigasi yang independen, objektif dan profesional serta sejalan dengan konvensi internasional yang berlaku.”*

Adapun misi Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi adalah *“menjaga dan meningkatkan keselamatan transportasi serta kepercayaan masyarakat “* dengan cara :

- Menjaga mandate yang diberikan Presiden agar tetap independen, objektif dan profesional;
- Melaksanakan investigasi kecelakaan secara akurat, objektif dan kajian (study) untuk keselamatan;
- Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang keselamatan;
- Melakukan advokasi dan promosi hasil laporan investigasi dan rekomendasi keselamatan kepada stakeholder dan para pelaku utama.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2017 (Audited) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA)) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Basis Akuntansi

Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan akuntansi dan pelaporan berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 (Audited) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Di samping itu, dalam penyusunannya telah ditetapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan Akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 (Audited) Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi adalah sebagai berikut :

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen yang lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban/terjadinya konsumsi aset/terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja. Dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- a. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- b. Investasi Jangka Pendek BLu dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- c. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- d. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan Penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- e. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- f. Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - o harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - o harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - o harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMN.

*Penyusutan
Asep Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat

disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi(TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, asset kerjasama dengan pihak ketiga(kemitraan) dank as yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan

metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum table masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produsen Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama Periode Berjalan, Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Realisasi
Pendapatan
Rp.1.500.000

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 1.500.000,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Negara dan Hibah Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Jasa, dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	1,500,000	-
2. Pendapatan Jasa	-	-	-
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	1,500,000	-

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2017 dan 2016 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNB pada TA 2017 sebesar Rp.1.500.000,- yang berasal dari pengelolaan BMN berupa penjualan barang yang dilelangkan untuk dihapuskan.

Pada TA 2017, Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi memperoleh pendapatan lain-lain sebesar Rp.0,-.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2017 dan 2016

URAIAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	1,500,000	41,000,000	-96.34
2. Pendapatan Jasa	-	-	0.00
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	0.00
Jumlah Pendapatan	1,500,000	41,000,000	-96.34

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja
Rp.30.086.615.979,-

Realisasi Belanja Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi pada TA 2017 adalah sebesar Rp. 30.086.615.979,- atau 90.29 % dari anggaran senilai Rp.32.321.670.000,-. Rincian Anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2017

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	32,794,749,000	29,562,689,979	90.14
Belanja Modal	526,921,000	523,926,000	99.43
Total Belanja Kotor	33,321,670,000	30,086,615,979	90.29
Pengembalian Belanja		-	0
Total Belanja	33,321,670,000	30,086,615,979	90.29

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2017 dan TA 2016 menunjukkan bahwa Realisasi Belanja pada 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 9,66% dibandingkan Realisasi Belanja Pada TA 2016. Hal ini di sebabkan :

1. Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi tahun 2016 dikarenakan adanya Revisi Anggaran;
2. Terserapnya Realisasi Belanja Modal TA 2017 hampir mencapai 100%.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	29,562,689,979	24,713,568,922	19.62
Belanja Modal	523,026,000	2,722,704,100	(80.79)
Jumlah Belanja	30,085,715,979	27,436,273,022	9.66

Belanja Pegawai
Rp0,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi pada 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dikarenakan Realisasi Belanja Pegawai pada Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi masih dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai Eselon I.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang

maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER TA 2017	REALISASI 31 DESEMBER TA 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	-
Belanja Lembur	0	0	-
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

Belanja Barang
Rp.29.562.689.979.

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember TA 2017 dan TA 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.29.562.689.979,- dan Rp.24.713.568.922,-. Realisasi Belanja Barang 31 Desember TA 2017 mengalami kenaikan 19,62% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan adanya Revisi Anggaran pada belanja barang dan efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas pegawai.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2017	REALISASI 31 DESEMBER 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	11,610,109,184	8,074,290,230	43.79
Belanja Barang Non Operasional	3,256,662,225	4,197,789,700	(22.42)
Belanja Jasa	447,043,360	435,209,968	2.72
Belanja Pemeliharaan	1,422,950,943	1,091,916,400	30.32
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	11,185,374,670	9,862,137,029	13.42
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1,640,549,597	1,052,225,595	55.91
Jumlah Belanja Kotor	29,562,689,979	24,713,568,922	19.62
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	29,562,689,979	24,713,568,922	19.62

Belanja Modal
Rp.523.926.000,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.523.926.000,- dan Rp.2.722.704.100,-.

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 80,76% dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2016. Hal ini disebabkan karena pagu belanja modal TA 2016 lebih besar dibanding dengan pagu belanja modal TA 2017.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2017	REALISASI 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	523,926,000	2,722,704,100	-80.76
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	523,926,000	2,722,704,100	-80.76
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	523,926,000	2,722,704,100	-80.76

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp.523.926.000,-

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.523.926.000,- mengalami penurunan sebesar 80,76% bila dibandingkan dengan 31 Desember TA 2016 sebesar Rp.2.722.704.100,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2017	REALISASI 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	523,926,000	2,722,704,100	-80.76
Jumlah Belanja Kotor	523,926,000	2,722,704,100	-80.76
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	523,926,000	2,722,704,100	-80.76

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp.0,-

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2017 dan 31 Desember TA 2016 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal ini

disebabkan karena pada Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi masih menggunakan gedung Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2017	REALISASI 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
JaringnsRp.0,-*

B.5.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing Rp.0,-.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal ini disebabkan karena pada Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi tidak terdapat belanja modal jalan irigasi dan jaringan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2017	REALISASI 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

*Belanja Modal
Lainnya Rp.0,-*

B.5.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing Rp.0,-.

Realisasi Belanja Modal Lainnya tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal ini disebabkan karena pada Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi tidak terdapat belanja modal Lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2017	REALISASI 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar

Rp.41.258.700,-

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.41.258.700,- dan Rp.99.248.100,-

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2016

No.	Aset Lancar	TA 2017	TA 2016
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -	Rp -
2	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp -	Rp -
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	Rp -	Rp -
4	Belanja Dibayar di Muka	Rp -	Rp -
5	Piutang Bukan Pajak	Rp -	Rp -
6	Bag Lancar Tagihan TP/TGR	Rp -	Rp -
7	Persediaan	Rp 41,258,700	Rp 99,248,100
	Jumlah	Rp 41,258,700	Rp 99,248,100

Kas di Bendahara

Pengeluaran Rp0,-

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

NO	Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Bank BNI Cab Harmoni 00478348250		
2	uang Tunai	-	-
	Jumlah	-	-

Kas di Bendahara

Penerima Rp0,-

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Hal ini dikarenakan tidak terdapat Kas di

Bendahara Penerimaan pada Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Uang Tunai	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.0,-

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Belanja Dibayar di Muka Rp.0,-

C.1.4. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp.0,-

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja dibayar dimuka adalah sebagai berikut :

Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

No	Jenis	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Pembayaran Internet	-	-
2	Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
3	Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah		-	-

Piutang Bukan Pajak
Rp.0,-

C.1.5. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Rincian Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

No	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1		-	-
2		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Rp.0,-

C.1.6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan piutang tak tertagih – piutang bukan pajak per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Penyisihan piutang tak tertagih - piutang bukan pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing debitor.

Rincian estimasi penyisihan sebagaimana adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak TA 2017

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyisihan
				-
				-
Jumlah				-

Bag Lancar TGR Rp,0,-

C.1.7. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Jumlah			

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bag. Lancar TP/TGR Rp.0,-

C.1.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.0,-

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Rincian estimasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyusutan
				-
				-
Jumlah				-

Persediaan
Rp.41.258.700,-

C.1.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.41.258.700,- dan Rp.99.248.100,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, berikut Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

No	Persediaan	T.A 2017	T.A 2016
1	Barang Konsumsi	41,258,700	99,248,100
2	Barang untuk Pemeliharaan	-	-
3	Suku Cadang	-	-
5	Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah		41,258,700	99,248,100

Aset Tetap
Rp.8.970.994.713,-

C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji sebesar Rp.8.970.994.713,- dan Rp. 11.327.986.748,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

No	Jenis	T.A 2017	T.A. 2016
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	38,392,219,904	38,383,844,004
3	Gedung dan Bangunan	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	75,515,000	75,515,000
5	Aset Tetap Lainnya	848,397,000	848,397,000
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
Jumlah		39,316,131,904	39,307,756,004
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(30,345,137,191)	(27,979,769,256)
Nilai Buku Aset Tetap		8,970,994,713	11,327,986,748

Tanah Rp0

C.2.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.0,-.

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No	KIB	Luas	Nilai
1			
2			
Jumlah			-

Peralatan dan Mesin
Rp.38.392.219.904,-

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp.38.392.219.904,- dan Rp.38.383.844.004,-.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2016	Rp	38,383,844,004
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	522,496,000
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	514,120,100
Penghapusan		
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	38,392,219,904
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	Rp	(30,345,137,191)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp	8,047,082,713

Mutasi berupa penambahan peralatan dan mesin adalah berupa :

No	Peralatan Dan Mesin	Kuantitas	Nilai
1	Alat Bengkel Bermesin	1	9,548,000
2	Alat Bengkel Tak Bermesin	3	2,189,000
3	Alat Ukur	20	40,139,000
4	Alat Kantor	1	4,268,000
5	Alat Rumah Tangga	25	49,885,000
6	Alat Studio	7	71,302,000
7	Alat Konumikasi	10	39,578,000
8	Alat Kedokteran	8	16,533,000
9	Unit Alat Laboratorium	7	28,600,000
10	Alat Khusus Kepolisian	3	6,457,000
11	Komputer Unit	13	191,664,000
12	Peralatan Komputer	3	55,722,000
13	Alat Kerja Penerbangan	1	3,619,000
14	Peralatan Olahraga	2	2,992,000
Jumlah		104	522,496,000

Rincian set tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp.0,-

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	-
Mutasi tambah:	
Renovasi dan pembangunan pos	-
Koreksi pencatatan nilai pengadaan partisi	-
Koreksi pencatatan nilai penambahan daya listrik	-
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai	-
Saldo per 31 Desember 2017	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	-
Nilai Buku per 31 Desember 2017	-

Tidak terdapat transaksi terhadap gedung dan bangunan, hal ini disebabkan karena Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi masih menggunakan gedung milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp.75.515.000,-

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.75.515.000,- dan Rp.75.515.000,- Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan komunikasi.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	75,515,000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Informasi Teknologi	-
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai	-
Saldo per 31 Desember 2017	75,515,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(30,345,137,191)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	(30,269,622,191)

Aset Tetap Lainnya
Rp .848.397.000,-

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember

2016 adalah Rp.848.397.000,- dan Rp.848.397.000,- .

Saldo per 31 Desember 2016	848,397,000
Mutasi tambah:	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai	-
Saldo per 31 Desember 2017	848,397,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(30,345,137,191)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	(29,496,740,191)

Konstruksi dalam
Pengerjaan Rp.0,-

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.0,-. Hal ini dikarenakan pada Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi tidak terdapat KDP.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap Rp.
30.345.137.191,-

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing Rp.30.345.137.191,- dan Rp. 27.979.769.256,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) .

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel 23, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 38,392,219,904	Rp (30,345,137,191)	Rp 68,737,357,095
2	Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	Rp -
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 75,515,000		Rp 75,515,000
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 848,397,000		Rp 848,397,000
	Akumulasi Penyusutan	Rp 39,316,131,904	Rp (30,345,137,191)	Rp 69,661,269,095

C.3 Piutang Jangka Panjang

Tuntutan

Perbendaharaan Rp.0,-

C.3.1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.0.- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No.	Debitur	Jumlah
1		
2		
	Jumlah	

Sedangkan mutasi (TP/TGR) pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	Rp0.00
Mutasi tambah:	
- TGR	Rp0.00
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi menjadi Bagian Lancar TP/TGR	Rp0.00
Saldo per 31 Desember 2017	Rp0.00

Penyisihan Piutang tak

Tertagih - Tuntutan

Perbendaharaan Rp.0,-

C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.0.-.

Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
				-

Aset Lainnya

Rp.11.271.797.605,-

C.4 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp.11.271.797.605,- dan Rp.12.359.560.805,-. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Lainnya 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

No.	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Aset Tak Berwujud	Rp 19,058,945,480	Rp 19,058,945,480
2	Aset Lain-Lain	Rp -	Rp (127,000,000)
	Jumlah	Rp 19,058,945,480	Rp 19,185,945,480
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Rp (7,787,147,875)	Rp (6,826,384,675)
	Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp 11,271,797,605	Rp 12,359,560,805

Aset Tak Berwujud

Rp.19.058.945.480,-

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp.19.058.945.480,- dan Rp. Rp.19.058.945.480,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset tak Berwujud

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 7,672,629,080
2	Lisensi	Rp 887,645,000
3	Hasil Kajian Penelitian	Rp 10,498,671,400
	Jumlah	Rp 19,058,945,480

Aset Lain-Lain Rp,0,-

C.4.2. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp.0,- dan Rp. 127.000.000,-

Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	Rp	127,000,000
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
Mutasi kurang:		
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	-
- penghapusan BMN	Rp	127,000,000
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	-
Akumulasi Penyusutan	Rp	(7,787,147,875)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp	(7,787,147,875)

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Kewajiban Jangka

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka
Pendek Rp.0,-

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji sebesar Rp.0,- dan Rp.0.-.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Aset Lancar	Jumlah
1	Utang kepada Pihak Ketiga	Rp -
2	Uang Muka dari KPPN	Rp -
3	Pendapatan yang Ditangguhkan	Rp -
4	Pendapatan Diterima di Muka	Rp -
	Jumlah	Rp -

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp.0,-

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing - masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1		Rp -	
Total		Rp -	

Uang Muka dari KPPN
Rp.0,-

C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Pendapatan Yang
Ditangguhkan Rp.0,-

C.5.3 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.0,-.

Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, pengembalian belanja, serta pungutan/potong pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2017.

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan pada Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

No	Uraian	Jumlah
1		
Total		Rp -

Pendapatan Diterima
Dimuka Rp.0,-

C.5.4 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.0,-.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

No	Uraian	2017
1		Rp -
Total		Rp -

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar
Rp.20.284.051.018,-

C.6 Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.20.284.051.018. dan Rp. 23.786.795.653,-.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBPNP

Rp. 0,-

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak-LO

Pendapatan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) - LO pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Pendapatan PNBPNP-LO merupakan hak pemerintah atas pendapatan PNBPNP karena adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, tanpa harus memperhatikan adanya adanya aliran kas masuk ke rekening kas negara. Rincian pendapatan PNBPNP - LO adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan PNBPNP-LO 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	2017	2016	Naik (Turun) %
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	-	-
2, Pendapatan Jasa	-	-	-
3, Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Pegawai Rp. 0,-

D.2. Beban Pegawai

Beban pegawai pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-.

Beban pegawai adalah beban atas kewajiban kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian beban pegawai adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai pada 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	2017	2016	Naik (Turun) %
Beban Gaji	-	-	-
Beban Tunjangan	-	-	-
Beban Honorarium	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Persediaan
Rp.895.127.450,-

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar masing-masing Rp. 895.127.450,- dan Rp. 908.968.540,-.

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi, baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian beban persediaan adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan PNBP-LO 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	2017	2016	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	895,127,450	908,968,540	(1.52)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang			
Beban Persediaan Lainnya		-	-
Jumlah	895,127,450	908,968,540	(1.52)

Beban Barang dan Jasa
Rp. 14.459.998.069,-

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban jasa pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. 14.459.998.069 dan Rp. 11.841.840.898,-

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka berupa penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian beban barang dan jasa adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2017 dan TA 2016

Uraian	2017	2016	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	1,703,200,164	1,907,391,831	(10.71)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	214,604,891	90,269,757	137.74
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	23,999,606	3,006,500	698.26
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	8,641,400,829	5,720,047,142	51.07
Beban Barang Operasional Lainnya	1,026,903,694	353,575,000	190.43
Beban Bahan	378,571,590	343,044,610	10.36
Beban Honor Output Kegiatan	353,470,000	1,110,840,000	(68.18)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,669,373,935	1,878,456,090	(11.13)
Beban Langganan Telepon	20,018,360	21,809,968	(8.21)
Beban Sewa	238,225,000	215,000,000	10.80
Beban Jasa Profesi	188,800,000	198,400,000	(4.84)
Beban Aset Ekstrakomtabel PM	1,430,000	-	-
Jumlah	14,459,998,069	11,841,840,898	22.11

Beban Pemeliharaan
Rp. 1.447.700.943,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.447.700.943,- dan Rp. 1.097.746.400,-.

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan asset tetap atau asset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2017 dan TA 2016

Uraian	2017	2016	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	337,632,457	140,239,000	140.76
Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin	1,085,318,486	951,677,400	14.04
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	24,750,000	5,830,000	-
Beban Pemeliharaan Lainnya		-	-
Jumlah	1,447,700,943	1,097,746,400	31.88

Beban Perjalanan Dinas
Rp. 12.825.924.267,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 12.825.924.267,- dan Rp. 4.186.803.149,-. Beban perjalanan dinas tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian beban perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2017 dan TA 2016

Uraian	2017	2016	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	8,901,443,336	2,565,252,408	247.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	2,038,975,833	740,337,285	175.41
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	244,955,501	154,435,000	58.61
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1,268,429,986	518,989,776	144.40
Beban Perjalanan Lainnya- Luar Negeri	372,119,611	207,788,680	79.09
Jumlah	12,825,924,267	4,186,803,149	206.34

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp. 0,-

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk

barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
31 Desember 2017 dan TA 2016

Uraian	2017	2016	Naik (Turun) %
Beban Gedung & Bangunan diserahkan ke	-	-	-
Beban Peralatan & Mesin diserahkan ke	-	-	-
Beban Barang Lainnya kepada masyarakat/pemda			
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp. 0,-

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan social pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Beban bantuan social merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko social dan bersifat selektif. Rincian beban bantuan social adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2017 dan TA 2016

Uraian	2017	2016	Naik (Turun) %
Beban Bansos untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bansos untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bansos untuk Pemberdayaan Sosial			
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp. 3.960.990.854,-

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.960.990.854,- dan Rp. 6.058.034.776,-.

Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat asset tersebut. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk asset tak berwujud. Rincian beban penyusutan dan amortisasi adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2017 dan TA 2016

Uraian	2017	2016	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan PM	2,870,860,590	3,339,521,576	(14.03)
Beban Amortisasi Software	998,998,700	7,551,500	13,129.14
Beban Amortisasi Lisensi	88,764,500	1,446,440,200	(93.86)
Beban Penyusutan AT yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	1,175,757,000	(100.00)
Beban Penyusutan AT yang tidak digunakan dalam Operasional	2,367,064	88,764,500	(97.33)
Jumlah	3,960,990,854	6,058,034,776	12,824

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp. 0,-

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang tak tertagih pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp0,-. Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktagihan piutang dalam satu periode tahun anggaran berjalan. Rincian beban penyisihan piutang tak tertagih adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih 31 Desember 2017 dan TA 2016

Uraian	2017	2016	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Ji Pendek	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Ji Panjang	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Lain-lain Rp.0,-

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja XXXX. Rincian beban lain-lain adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap 31 Desember 2017 dan TA 2016

Uraian	2017	2016	Naik (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan & M	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung & Ba	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.1.880.969,-

D.12. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2017 dan TA 2016

Uraian	2017	2016	Naik (Turun) %
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1,500,000	41,000,000	(96.34)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	6,260,381	-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(4,760,381)	41,000,000	(111.61)
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Operasional Lainnya	7,330,400	69,808,490	(89.50)
Beban Pelepasan Aset Non Operasional Lainnya	689,050	-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Operasional Lainnya	6,641,350	69,808,490	(90.49)
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	1,880,969	110,808,490	185.84

Pos Luar Biasa Rp.0,-

D.14. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta diluar kendali entitas. Nilai surplus/defisit dari Pos Luar Biasa adalah Rp.0,-. Sehingga entitas mengalami defisit Laporan Operasional sebesar Rp.0,-. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2017 Entitas mengalami defisit LO sebesar Rp. 33.587.860.614,-.

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp. 23.786.795.653,-

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 1 Januari 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.23.786.795.653,- dan Rp. 31.677.968.494,-.

Defisit LO
Rp. 33.587.860.614,-

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.33.587.860.614,- dan Rp. 30.710.144.748,-.

Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Koreksi Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar Rp.0,-

E.3 Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp.0,-.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp. 0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp.0,-

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	KOREKSI
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan untuk Pemeliharaan	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp. 0,-

E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0,-.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp. 0,-

E.3.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.4.576.301.115,-.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2017

Jenis Aset Tetap	Koreksi		Total
	Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	-	0	-
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Jumlah			-

Koreksi Lain-lain Rp.0,-

E.3.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain: Koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp.
30.085.115.979,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.30.085.115.979,- dan Rp. 27.395.273.022,-. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal LK, antar LK, antar BUN maupun LK dengan BUN.

Rincian Nilai Transakis Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1,500,000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	30,086,615,979
Transfer masuk	-
Transfer Kleuar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	30,085,115,979

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan Ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017, DDEL sebesar Rp.1.500.000,- sedangkan DKEL sebesar Rp.30.086.615.979,-.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,- terdiri dari :

NO	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	-	0
2	Gedung dan Bangunan	-	0
3	Persediaan	-	0
Jumlah			0

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,-.

NO	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	-	0
2	Gedung dan Bangunan	-	0
3	Persediaan	-	0
Jumlah			0

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pencatatan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,-.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2017 adalah Rp.0,-.

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 20.284.051.018,- dan Rp.23.786.795.653,-.

Ekuitas Akhir

Rp.20.284.051.018,-

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F. 1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING

Beberapa kejadian-kejadian penting yang muncul dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahunan (Audited) tahun 2017 Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi yaitu antara lain :

1. Pada Periode Semester I 2017 terdapat Penghentian Penggunaan Aset Tetap yang tidak digunakan sebesar Rp. 185.999.000,- yang terdiri dari Peralatan dan Mesin.
2. Terdapat Jurnal tidak lazim yaitu berupa Jurnal Penyesuaian terhadap Aset Peralatan dan Mesin yang masuk ke dalam Aset Ekstrakomtabel sebesar Rp. 1.430.000,-. Penjelasan detail terdapat pada rekap Pembelian Laporan Daftar BMN menurut jenis transaksi gabungan Intrakomtabel dan Ekstrakomtabel pada Semester I Tahun 2017 (Aplikasi SIMAK).
3. Terdapat transfer keluar Peralatan dan Mesin pada periode semester II 2017 berupa 1 (satu) unit Kendaraan Operasional Roda 4 (empat) senilai Rp. 328.121.100,- kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
4. Pada periode semester II 2017 telah dilaksanakan penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 185.999.000,- dengan nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.500.000,-.